

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu aspek penting untuk melihat seberapa makmurnya suatu daerah. Untuk mendapatkan kemakmuran masyarakat suatu daerah dibutuhkan pembangunan melalui pengembangan perekonomian dimana pengembangan perekonomian itu dapat mengatasi masalah sosial dalam masyarakat seperti pengangguran dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang baik dalam suatu daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

Salah satu tolok ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia. Hal ini dikarenakan adanya keberagaman masyarakat, perbedaan setiap daerah, serta kondisi sosial masyarakat yang beragam sehingga menyebabkan tingkat pendapatan tiap daerah berbeda – beda. IPM merupakan indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah mempunyai kesempatan untuk melihat hasil dari suatu pembangunan sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Indeks IPM terdiri dari tiga komponen yang berhubungan dengan tingkat produktivitas masyarakatnya. Dengan masyarakat yang sehat dan berpendidikan, produktivitas masyarakat akan meningkat (Primandari, 2019).

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian yang dapat diukur dengan menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Adisasmita, 2015). Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dari kenaikan *output* perkapita dalam jangka panjang (Boediono, 2011). Indeks IPM dapat didorong oleh Pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diperlukan mempercepat struktur perekonomian yang berimbang dan dinamis bercirikan industri yang kuat dan maju, pertanian yang tangguh serta memiliki basis pertumbuhan sektoral yang seimbang. Pertumbuhan ekonomi juga diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi kesenjangan sosial ekonomi (Megantara & Made, 2020).

Pengangguran merupakan permasalahan makro ekonomi yang memiliki pengaruh besar. Secara umum, kehilangan pekerjaan dapat mengakibatkan penurunan tingkat kesejahteraan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak bekerja sama sekali, beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab pengangguran terbuka antara lain tidak tersedianya lapangan kerja, penurunan kegiatan ekonomi dan ketidakcocokan antara kesempatan kerja dengan latar belakang pendidikan pelamar. Dampak negatif dari pengangguran adalah dapat mengurangi pendapatan masyarakat yang berarti tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat akan

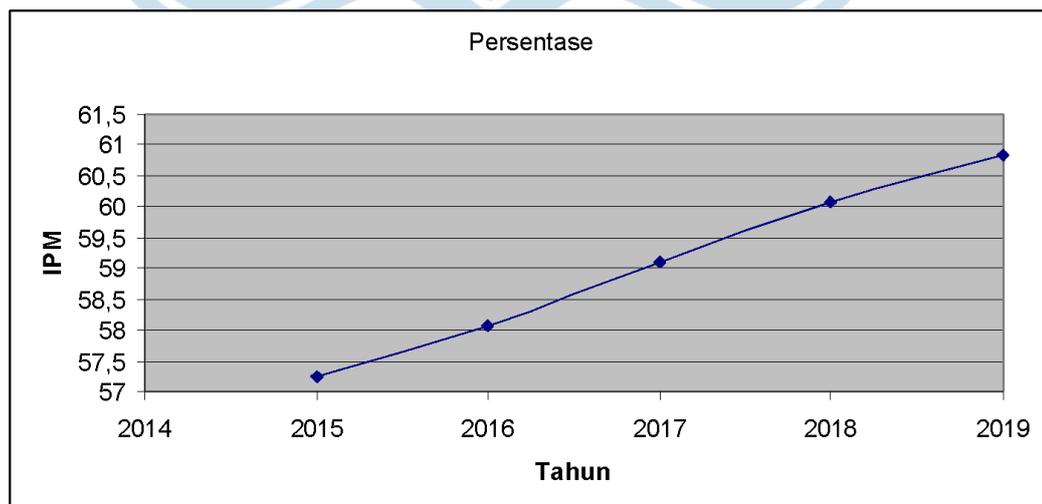
menurun. Tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun akibat dari pengangguran dapat mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia karena dengan tidak memiliki pendapatan, maka masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya termasuk pendidikan, kesehatan dan sudah tentu akan menurunkan daya beli. Dalam bidang politik pengangguran memberikan efek buruk karena kemungkinan akan terjadi kekacauan politik dan sosial yang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2013).

Penelitian ini dilakukan pada kota dan kabupaten di Provinsi Papua Barat. Hal ini dikarenakan pembangunan manusia di Papua Barat yang terendah di Indonesia.

**Tabel 1.1**  
**Persentase IPM di Provinsi Papua Barat Tahun 2015-2019**

Tahun	Persentase
2015	57,25
2016	58,05
2017	59,09
2018	60,06
2019	60,84

Sumber : BPS Papua Barat, Data Indeks Pembangunan Manusia (2020).



**Gambar 1.1 Grafik Persentase IPM di Provinsi Papua Barat Tahun 2015-2019**

Pada Tabel 1.1 dan Gambar 1.1., dapat dilihat perkembangan dan pertumbuhan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Papua Barat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Jika dilihat dari tabel di atas, perkembangan IPM di Provinsi Papua Barat tahun 2015 hingga 2019 cenderung meningkat setiap tahunnya. Dari tahun 2015 IPM sebesar 57,25 persen yang kemudian meningkat terus menerus hingga tahun 2019 sebesar 60,84 persen. Namun demikian, IPM Papua Barat adalah IPM yang masih terendah di Indonesia.

Berdasarkan fenomena di atas mendorong peneliti untuk melihat bagaimana hubungan antara PDRB per kapita dan tingkat pengangguran terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua Barat. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan mengambil judul **”Pengaruh PDRB Per Kapita dan Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap IPM di Kota dan Kabupaten Provinsi Papua Barat Tahun 2015-2019 ”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini:

- a. Bagaimana pengaruh PDRB per kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kota dan kabupaten di Provinsi Papua Barat 2015-2019?
- b. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kota dan kabupaten di Provinsi Papua Barat 2015-2019?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh PDRB per kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua tahun 2015-2019.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua tahun 2015-2019.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai:

- a. Masukan bagi dinas pemerintahan terkait yang ada di kota dan kabupaten Provinsi Papua Barat dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- b. Salah satu syarat memperoleh derajat S1 pada program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

### **1.5. Hipotesis**

Berdasarkan teori hubungan antar variabel, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

- a. Diduga PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kota dan kabupaten di Provinsi Papua Barat tahun 2015-2019.

- b. Diduga tingkat pengangguran terbuka berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kota dan kabupaten di Provinsi Papua Barat tahun 2015-2019.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I            **PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan.

Bab II           **TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas landasan teori dan studi empiris terkait yang pernah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan dijadikan sebagai acuan dasar penelitian.

Bab III          **METODE PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari data dan sumber data, teknik pengumpulan data, model, alat analisis dan definisi operasional.

Bab IV          **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang sifatnya terpadu terkait permasalahan yang diangkat.

Bab V           **PENUTUP**

Bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sehubungan dengan permasalahan yang dibahas